ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DI TEBING TIGGI

Rusli Halil Nasution¹, Sakban Lubis²
¹Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli
²Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Kata Kunci:

Analisis, Faktor, Penghambat, Keberhasilan, Mediasi, Pengadilan Agama.

*Correspondence Address:
ruslihalil3@gmail.com

Abstrak : Mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara perceraian dan sengketa keluarga lainnya. Namun, keberhasilan mediasi tidak selalu tercapai, dan tingkat kegagalannya cenderung tinggi di beberapa wilayah, termasuk di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim mediator, pihak berperkara, dan staf kepaniteraan, serta melalui telaah dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi, antara lain: kurangnya itikad baik dari para pihak, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi, serta keterbatasan waktu dan beban kerja mediator yang tinggi. Selain itu, rendahnya kualitas komunikasi antara para pihak juga turut menjadi faktor signifikan yang menghambat tercapainya kesepakatan damai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan mediator, serta penguatan regulasi internal yang mendukung optimalisasi proses mediasi di lingkungan peradilan agama.

PENDAHULUAN

Salah satu asas penting dalam sistem peradilan di Indonesia adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang telah diakomodasi dalam sistem peradilan, termasuk di lingkungan peradilan agama. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa secara sukarela, efektif, dan efisien, serta meminimalkan dampak negatif dari proses litigasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. PERMA ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara di pengadilan dan bersifat wajib sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian (Mahkamah Agung RI, 2016). Di lingkungan Pengadilan Agama, mediasi banyak diterapkan dalam perkara perceraian, hak asuh anak, harta bersama, dan sengketa waris.

Namun, dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih tergolong rendah. Data empiris dari berbagai pengadilan agama menunjukkan bahwa banyak proses mediasi yang berakhir tanpa kesepakatan (gagal). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apa saja faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi tersebut. Kondisi ini juga tercermin di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, yang menangani berbagai perkara keluarga, terutama perceraian. Meskipun mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, tingkat keberhasilannya masih belum optimal. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain rendahnya itikad baik para pihak, kurangnya kapasitas mediator, ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi, serta lemahnya pemahaman tentang tujuan mediasi itu sendiri.

Menurut Latifah (2017), keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan komunikatif mediator, kesediaan para pihak untuk berkompromi, serta suasana mediasi yang kondusif. Sementara itu, Surbakti (2018) menekankan bahwa faktor sosiokultural, emosi, dan latar belakang hukum para pihak juga turut memengaruhi jalannya mediasi. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi khususnya di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, sebagai upaya perbaikan ke depan dalam mewujudkan peradilan yang adil, cepat, dan murah.

Dalam konsep peradilan, mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di Pengadilan Agama. Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para mediator non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dan tercatat dalam daftar mediator dan untuk para hakim di Pengadilan Agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi mediator dan mediator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Para Hakim mediator dan mediator non hakim, diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi baik dari jurnal-jurnal maupun melalui internet atau tulisan-

tulisan yang ada, sehingga mendapatkan wawasan yang luas terkait mediasi. Mengingat waktu yang diberikan untuk mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama cukup sedikit, maka diharapkan para hakim mediator dan mediator non hakim dapat menyusun strategi-strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik, hal inilah yang harus dilakukan oleh Hakim Mediator dan mediator non hakim di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A agar mampu mencegah terjadinya putusan perceraian (Khairul Anam, 2021).

Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga menyebabkan pisah ranjang haruslah dilakukan oleh para hakim mediator dan mediator non hakim secara optimal (Muhammad Khusni, 2021).

Tingkat keberhasilan tersebut masih jauh dari harapan Mahkamah Agung. Salah satu tujuan diberlakukannya PerMA mediasi yakni agar dapat dengan mudah menyelesaikan perkara secara win-win solution. Yang di maksud dengan win-win solution yaitu sebuah proses khususnya proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahannya, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikannya, melakukan suatu kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan mengambil tindakan, menawarkan keuntungan perkara tertentu, dan berupaya menyelesaikan perkara untuk kepentingan kedua belah pihak serta mengurangi jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan (Nasrina, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Menurut Moleong (2018), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial dari perspektif partisipan dan mengeksplorasi makna di balik fakta yang tampak. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berfokus pada makna, pengalaman, dan proses.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta empiris bahwa tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan ini masih tergolong rendah, sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Juli hingga September 2025, mencakup tahap observasi awal, pengumpulan data, dan analisis data.

Teknik pengumpulan data melakukan wawancara, yaitu wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi dari mahasiswa mengenai pemahaman mereka terhadap hukum nikah beda agama. Pengumpulan juga melakukan Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat dinamika diskusi, forum kajian, atau kegiatan akademik yang membahas isu ini. Dan terkaht peneliti melakukan dokumentasi dilakukan terhadap hasil diskusi, makalah mahasiswa, dan literatur yang digunakan dalam proses perkuliahan terkait topik ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan dokumen, kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep hukum Islam. Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sikap mahasiswa terhadap nikah beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *medire* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. (Syahrizal, 2011).

Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan KBBI mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat

dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. (Syahrizal, 2011).

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri (John W. Head, 1997).

Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. Mediator dalam PERMA adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa haruslah orang atau lembaga yang netral yang mampu menjembatani keinginan para pihak. Karena peranan mediator sangat penting, maka mediator harus memiliki peran dan karakter yang kuat dalam proses mediasi.

Adapun sisi peran kuat mediator menurut Soeharto adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

Tugas Mediator Dalam Perkara

Mediasi merupakan proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara. (Fatahillah:2012).

Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Mediator sangat berperan dalam proses mediasi. Peran mediator di samping memberikan pencerahan kepada para pihak untuk membuka pikiran para pihak, mediator juga memberikan pengertian hukum yang berlaku dan hukum apa yang ingin digunakan oleh para pihak, memberitahukan kerugian apa yang akan dihadapi, meleraikan para pihak, mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil.

Menurut Steven Vago didalam buku Strategi dan Taktik Mediasi secara gambaran umumnya mediator memiliki peran yaitu:

- 1) Sebagai Pemandu. Mediator membuka jalannya mediasi, menjelaskan lebih dalam secara singkat mengenai mediasi, mengatur arah atau jalannya mediasi dan tak lupa menutup jalannya mediasi jika mediasi telah selesai;
- 2) Katalisator. Seorang mediator pada saat mediasi berlangsung dapat memberikan
 - a. dorongan terhadap lahirnya suasana yang terarah pada saat diskusi pada sesi
 - b. perundingan;
- 3) Fasilitator. Seorang mediator juga memfasilitasi para pihak untuk menggali perkara para pihak, mencarikan solusi yang terbaik serta mediator juga bekerja sama dengan para pihak yang bersangkutan untuk menggapai penyelesaian ini dengan jalur non litigasi. (Steven Vago: 2021).

Sedangkan menurut Gatot S berpendapat mengenai peran seorang mediator ada 6, yaitu:

- 1) Menyusun agenda;
- 2) Mempelancar serta mengendalikan suatu komunikasi;
- 3) Identifikasi masalah dan kepentingan krusial para pihak bersangkutan;
- 4) Melakukan diagnosis permasalahan yang sedang berlangsung;
- 5) Membantu pihak bersengketa yang sedang melakukan mediasi untuk mengumpulkan informasi penting dimana hal tersebut melahirkan suatu pilihan yang memudahkan penyelesaian suatu permasalahan; dan yang terakhir.
- 6) Mengajarkan atau mengarahkan para pihak ketika mediasi berlangsung serta piawai dalam hal negosiasi atau tawar-menawar. (Gatot Seomartono:2006).

Tipe Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selain keberadaan para pihak, juga sangatlah penting peran seorang mediator. Cristopher W. Moore membagi mediator ke dalam tiga tipe mediator, yaitu:

1. Social Network Mediators. Yaitu orang-orang yang oleh pihak dikenal baik dan dapat dipercaya oleh para pihak yang bertikai. Esensinya adalah upata untuk mempertahankan keserasian hubungan baik dalam sebuah komunitas karena mediator dan para pihak menjadi bagian di dalamnya.
2. Authoritative Mediators. Mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Akan tetapi Authoritative Mediators selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangannya atau pengaruhnya, namun dalam situasi tertentu mediator akan memberikan batasan-batasan tertentu dalam upaya pemecahan masalah.
3. Independent Mediators. Mediator yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator professional. Selain itu dalam proses mediasi di Pengadilan para pihak berhak memilih mediator sebagaimana terdapat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8, yaitu:
 - a) Hakim bukan pemeriksa perkara-perkara pada Pengadilan yang bersangkutan.
 - b) Advokat atau akademis hukum.
 - c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
 - d) Hakim majelis pemeriksa perkara.
 - e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam ayat (1) dan (4) gabungan antara ayat (2) dan (4) atau gabungan antara ayat (3) dan (4). (Perma:20213).

Oleh sebab itu inti dari pelaksanaannya yaitu untuk mendorong atau mempengaruhi pihak-pihak yang sedang berselisih dengan berbagai macam cara dimana hal ini dilakukan

agar tidak memilih jalur Pengadilan (litigasi) serta lebih memilih jalur perdamaian yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Perlu di ingat bahwa seorang mediator tidak mempunyai kapasitas untuk mengutarakan atau mencampuri atas kepentingan pribadi dalam hasil mediasi dan seorang mediator tidak memiliki kewenangan mengambil suatu keputusan. (Rachmadi: 2023).

Pembahasan

Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Di Tebing Tinggi

Melaksanakan proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak untuk mendamaikan para pihak dalam sengketa pembagian harta warisan dengan menggunakan orang ketiga sebagai penengah atau mediator tidaklah selalu berjalan mulus, sering dihadapkan dengan hambatan-hambatan. Tingkat keberhasilan mediasi pada penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama kelas II Tebing Tinggi masih rendah, tidak sampai 50 persen, yaitu hanya sekitar 30 persen, dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang dihadapi.

Gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator khususnya terkait sengketa harta warisan berupa di Pengadilan Agama kelas II Tebing Tinggi itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan proses mediasi ini menjadi sering mengalami kegagalan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi. Para pihak harus hadir pada proses persidangan, jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini mendorong bagi para pihak untuk memenuhi panggilan di Pengadilan.
2. Secara substansi, mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Kelas II Tebing Tinggi telah dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai kurang efektif karena banyak faktor yang menghambat mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan.
3. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak

tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kelas II Tebing Tinggi sehingga berpengaruh pada minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang nakal untuk terhindar dari hukuman yang diberikan hakim. Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka tidak dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Seandainya di awal pertemuan tidak ditentukan jadwal pertemuan secara berkala, maka atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika setelah dilakukan dua kali panggilan secara patut, pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Ketentuan seperti itu diatur untuk menghindari proses yang bertele-tele, jika para pihak memang tidak bersungguh-sungguh untuk menempuh proses perdamaian. (Wawancara)

4. Tidak Ada Yang Mau Mengalah Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan masing-masing pihak untuk menang. Maka dari itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing, karena perkara kewarisan sendiri merupakan sengketa yang menyangkut masalah harta. (Wawancara).
5. Kualitas Mediator. Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator. Masih banyak hakim, terutama di Pengadilan yang berada Tebing Tinggi, yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung Republik Indonesia, walaupun ada beberapa pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk

semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Fatahillah:2012). Berdasarkan PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak memuat suatu aturan tentang mekanisme yang tegas menyatakan bahwa para pihak harus hadir dalam proses mediasi. Tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila para pihak tidak hadir dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan. Akibat hukum hanya timbul apabila mediasi tidak dilalui, artinya bisa saja mediasi dianggap sebagai formalitas belakang. Oleh karena salah seorang atau para pihak tidak hadir dalam mediasi maka proses Peradilan akan berlanjut dengan keterangan bahwa mediasi telah gagal dilakukan. Dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara sangat tergantung pada terpenuhinya tidaknya persyaratan formal perkara sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata. (Wawancara) Perasaan emosi, gengsi dan tidak ingin berkomunikasi satu dengan yang lainnya merupakan faktor para pihak tidak menghadiri proses mediasi. Adanya sifat yang ingin menang sendiri dan mengharapkan putusan yang menyatakan menang atau kalah, membuat para pihak tidak mau datang pada proses mediasi. Dengan gagalnya proses mediasi maka persidangan akan dilanjutkan dengan proses litigasi, yaitu merupakan tujuan para pihak yang ingin mendapatkan putusan yang menyatakan menang atau kalah (win-lose).

6. Kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berdamai Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Mediasi akan berhasil bilamana para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan win-win solution. Apabila para pihak hanya mengikuti emosi mereka dan hanya mengejar keuntungan maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Asas itikad baik dari para pihak sangat menentukan tercapai atau tidaknya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikad baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik pun tidak akan terselesaikan.(Wawancara). Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi, karena adanya kewajiban

bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan itikad baik dan menunjukkan sikap profesional, karena pihak yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak berusaha memahami kepentingan pihak lawannya. Jika terjadi hal seperti ini, pihak lawannya dapat menyatakan mediasi tidak layak.

7. Kurangnya dukungan para Hakim. Mediasi di Pengadilan Agama kelas II Tebing Tinggi dibantu oleh Mediator Non hakim yang bersertifikat dan profesional Mediator. Dengan pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan menambah tugas para Hakim. Para Hakim berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan sengketa secara memutus. Gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai Mediator intinya adalah mendamaikan. Dengan demikian menjadi Mediator merupakan tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas intensif.
8. Ruang mediasi. Saranan dan prasarana ruang mediasi memang menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi profesionalisme penegakan hukum. di Pengadilan Agama kelas II Tebing Tinggi telah memiliki ruangan khusus mediasi. Mengingat ruangan mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Disamping faktor kerahasiaannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya, mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan menambah tugas para Hakim. Para Hakim berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan sengketa secara memutus. Gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai Mediator intinya adalah mendamaikan. Dengan demikian menjadi Mediator merupakan tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas intensif.
9. Ruang mediasi. Saranan dan prasarana ruang mediasi memang menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi profesionalisme penegakan hukum. di Pengadilan Agama kelas II Tebing Tinggi telah memiliki ruangan khusus mediasi. Mengingat ruangan mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Disamping faktor kerahasiaannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya.
10. Kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui

mediasi. Tugas Pengacara adalah berusaha untuk memenangkan perkara yang dibebankan oleh klien kepadanya. Hal ini mempengaruhi proses keberhasilan mediasi. Dalam menjalankan profesinya seorang pengacara ada yang pro (mendukung proses mediasi) dan ada juga yang kontra (tidak mendukung proses mediasi). Dikaitkan dengan hal ini para pengacara yang kontra (tidak mendukung proses mediasi).(Wawancara).

11. Campur Tangan Pihak Ketiga. Seringkali ditemukan penyebab ketidak berhasilan mediasi yang disebabkan oleh adanya campur tangan pihak ketiga, khususnya dari pihak keluarga karena dalam beberapa perkara ada pihak-pihak yang sangat menghormati peran keluarga sehingga Apabila keluarga mereka tidak memberikan persetujuan terhadap perdamaian, maka pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat dipengaruhi untuk tidak memilih jalur perdamaian. Selain dari keluarga, campur tangan pihak ketiga juga bisa datang dari orang lain seperti dari pihak wanita idaman lain/pria idaman lain yang sudah ada dalam permasalahan perkawinan para pihak yang berperkara. Ketika pihak ketiga ikut campur, maka mendapatkan kesepakatan dan perdamaian akan menjadi lebih sulit bagi semua pihak karena mereka menjadi rentan terhadap pengaruh dari pihak ketiga tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.(Politika Progresif:2024).

Pelaksanaan mediasi dalam praktek di Pengadilan sering terjadi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, sehingga agak sulit untuk mengupayakan perdamaian. Hal ini dikarenakan para kuasa hukum tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan itikad baik untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, bagi mereka praktek mediasi dapat mengancam mata pencaharian mereka, sebab Pengacara akan mendapat honor yang lebih besar bila ia berhasil memenangkan perkara.

Hambatan-hambatan yang dihadapi saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan adalah:

1. Para pihak tidak mau mendengar arahan
2. Para pihak tidak mengerti tentang mediasi
3. Para pihak berprinsip pada prinsipnya masing-masing yaitu keegoisan masing-masing pihak, apakah itu karena dendam, apakah itu karena benci. Mediasi hanya akan efektif jika para pihak benar-benar ingin menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi. Jika hanya satu pihak yang mempunyai itikad baik itu maka mediasi tidak akan berhasil.

Itikad baik daripada para pihak sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang win-win solution. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai (Nurnaningsih:2021).

4. Hambatan-hambatan saat proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan itu dapat di atasi dengan upaya yang dilakukan oleh Mediator Hakim, yaitu Mediator Hakim harus lebih pintar dari pada para pihak yang bersengketa. Jadi, dengan adanya penyampaian yang dilakukan oleh Mediator Hakim, sehingga tantangan yang dihadapi dapat diminimalisir, semakin kecil hambatan yang dihadapi semakin besar kesempatan untuk mencapai kata damai.(Wawancara).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari beberapa faktor utama. Pertama, faktor internal para pihak, seperti kurangnya itikad baik, ego yang tinggi, dan ketidaksiapan emosional, sering menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan damai. Kedua, faktor mediator, meliputi kurangnya keterampilan komunikasi, pengalaman, atau pendekatan yang kurang fleksibel dalam menangani konflik juga turut memengaruhi hasil mediasi. Ketiga, faktor sistemik dan administratif, seperti keterbatasan waktu, sarana prasarana yang kurang memadai, serta belum optimalnya pelaksanaan prosedur mediasi yang efektif, juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keberhasilan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, diperlukan sinergi antara peningkatan kualitas dan profesionalitas mediator, penguatan sistem mediasi, serta peningkatan kesadaran hukum dan motivasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari beberapa faktor utama. Pertama, faktor internal para pihak, seperti kurangnya itikad baik, ego yang tinggi, dan ketidaksiapan emosional, sering menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan damai. Kedua, faktor mediator, meliputi kurangnya keterampilan komunikasi, pengalaman, atau pendekatan yang kurang fleksibel dalam menangani konflik juga turut

memengaruhi hasil mediasi. Ketiga, faktor sistemik dan administratif, seperti keterbatasan waktu, sarana prasarana yang kurang memadai, serta belum optimalnya pelaksanaan prosedur mediasi yang efektif, juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keberhasilan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, diperlukan sinergi antara peningkatan kualitas dan profesionalitas mediator, penguatan sistem mediasi, serta peningkatan kesadaran hukum dan motivasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

REFERENSI

- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi yudisial di Indonesia. Peluang dan tantangan dalam menunjukan*
Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan*
Gatot Soemartono, (2006) , *Arbitrase dan Mediasid iIndonesia*, Jakarta: Gramedia.
- John W. Head. 1997. *Penghantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, halaman 42.
- Khoirul Anam, *Strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian*, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Vol. 7 No. 1 (Juli 2021).
- Latifah, Siti. (2017). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 112-125.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jakarta: Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2 Juni 2024, hal. 70.
- Muhammad Khusni Zulkfa dan Achmad Muchsin, *Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017*, *Jurnal Al-Hukkam*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2021).
- Nasrina M. Adam, *Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan*
Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- PERMA Nomor 1. Tahun 2016
POLITIKA PROGRESIF - Vol. 1 No.2 JUNI 2024
- Rachmadi, Usman, (2013), *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan ke III, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sistem peradilan (Cet 1: Bandung. CV. Mandar Maju. 2012.

- Steven Vago, (1991), *Law and Society*, h.179 dalam buku Maskur Hidayat, (2016), *Strategi dan Taktik*
- Surbakti, Maruli. (2018). *Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(1), 65-78.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, halaman 1-2.